

Penelitian
Proyek SPP/DPP Universitas Andalas
Tahun 1999

**Analisis Bantuan Modal Melalui Lembaga-Lembaga
Keuangan Bagi Pengembangan Perusahaan Kecil di
Daerah Pedesaan Sumatera Barat.**

Diajukan Oleh :
Des. Herman Darmawi



Fakultas Ekonomi
Universitas andalas
Padang, Februari 2000

ANALISIS BANTUAN MODAL MELALUI LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN BAGI PENGEMBANGAN PERUSAHAAN KECIL di DAERAH PEDESAAN SUMATERA BARAT.

Oleh : Dra. Herman Darmawi

Abstrak

Industri kecil strata bawah sangat membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Untuk ini pemerintah telah menanggapi dengan membentuk sistem per Kreditan yang khusus untuk usaha kecil dengan tingkat bunga yang disubsidi. Tetapi pengusaha kecil itu masih saja tidak bisa mendapatkan kredit tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan industri kecil tidak mampu memanfaatkan fasilitas kredit usaha kecil itu. Hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk mendukung upaya pembentukan sistem dan mekanisme penyediaan bantuan modal yang efektif bagi pengembangan industri kecil lapisan bawah di daerah pedesaan di Sumatera Barat.

Survei yang dilakukan terhadap sejumlah sampel menunjukkan bahwa faktor-faktor prasyarat kredit, jangkauan pelayanan bank, tingkat bunga, sikap layanan petugas bank, kemampuan memperkirakan resiko usaha, dan penantian kredit berpengaruh nyata terhadap kemampuan pengusaha industri kecil memanfaatkan fasilitas kredit bank. Lembaga keuangan yang terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan kredit penduduk desa ialah BRI Unit Desa dan BPR. Sedangkan lembaga non-bank seperti Koperasi, LKMD dan LSM dalam lingkungan terbatas juga terbukti efektif untuk menyalurkan kredit sebagai perpanjangan tangan bank umum.

Pendahuluan

Walaupun menurut catatan statistik menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Sumatera Barat tinggal di pedesaan, namun belakangan ini terlihat kecenderungan semakin banyak pemuda terdidik meninggalkan desanya untuk mencari pekerjaan di kota. Jelaslah bahwa kesempatan kerja di pedesaan semakin mendesak untuk dicarikan pemecahannya. Salah satu pemecahan yang mengandung harapan adalah mengembangkan usaha-usaha kecil yang secara tradisional sudah ada di desa itu. Karena itulah orientasi pembangunan Sumatera Barat sebaiknya dititik beratkan pada pembangunan daerah pedesaan.

Adanya bantuan kredit yang memadai diharapkan dapat meningkatkan produksi. Karena itulah pemerintah melalui perbankan mengharapkan kredit usaha kecil, dengan

tingkat bunga yang relatif rendah. Setelah lebih delapan tahun kredit usaha kecil (KUK) berjalan, ternyata belum dapat menjangkau pengusaha kecil lapisan bawah, meskipun tingkat bunganya rendah. Salah satu kendalanya adalah persyaratan yang diminta perbankan tidak dapat dipenuhi oleh pengusaha kecil strata bawah, yang pada umumnya tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan pihak bank.

KUK merupakan pengganti kredit program Bank Indonesia yaitu (KIK dan KMKP). KUK itu lahir dengan paket Deragulasi 29 Januari 1990 dalam rangka penyempurnaan sistem perkreditan nasional. KUK ini tidak lagi merupakan Kredit Program yang disubsidi Bank Indonesia, tetapi merupakan salah satu program kredit bagi setiap bank umum. Setiap bank diwajibkan menyediakan 20% dari total kreditnya sebagai KUK. Bank Umum yang tidak memenuhi target itu diberikan sanksi denda.

Ditinjau dari segi sistemnya, adanya KUK ini sangat melegakan pengusaha kecil. Namun disinilah terjadi dilema. Disatu pihak, bank kewalahan mencari perusahaan yang layak diberi KUK. Dipihak lain, pengusaha kecil banyak yang mengeluh karena permohonan KUK-nya ditolak pihak bank (Irvandi Gustari 1997). Jadi terdapat suatu kendala yang sulit ditembus oleh masing-masing pihak.

Ditinjau dari sudut pengusaha kecil dapat dikemukakan berbagai kemungkinan yang menyebabkan timbulnya kendala tersebut. Pertama mungkin latar belakang sosial budaya dan psikologis sehingga mereka segan berhubungan dengan bank. Kedua, mungkin informasi tentang tersedianya kredit tersebut tidak dapat menjangkau tempat usaha mereka. Ketiga mungkin bank meminta persyaratan perbankan yang tidak mungkin mereka penuhi. Karena itu mereka mencari alternatif lain yang sederhana, yaitu menggunakan sumber dana tradisional seperti pelepas uang, kredit dari pemasok, kredit dari pembeli (ijon), yang

walaupun mahal, tetapi prosedurnya gampang, cepal dan sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka.

Selanjutnya ditinjau dari sudut perbankan (Abdul Salam 1995), pihak bank mengemukakan pula beberapa kendala berkenaan dengan penyaluran KUK, yaitu tingginya biaya overhead, sulit menemukan pengusaha kecil yang layak diberi kredit, tingginya resiko dan terbatasnya jaringan kantor bank untuk dapat melayani pengusaha kecil itu.

Untuk keperluan penelitian ini perlu diberikan batasan istilah industri kecil. Menurut undang-undang no 9 tahun 1995 memberikan defenisi industri kecil adalah perusahaan yang assetnya tidak lebih dari RP 60.000.000. Kalau dinilai kembali asset itu sekarang setelah krisis moneter adalah kira-kira 2 milyar rupiah. Jadi ranking yang diberikan sangat panjang sehingga industri-industri kecil informal yang bermodal ratusan ribu rupiah sangat sukar dikategorokan sebagai industri kecil. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang disebut industri kecil adalah industri yang assetnya dibawah seratus juta rupiah, yaitu industri starata paling bawah yang sering pula disebut pengrajin atau pengusaha informal. Kredit yang dibutuhkan mereka bervariasi dari ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah saja.

Bertolak dari dugaan tersebut diatas, maka diperlukan suatu penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan pihak pengusaha tidak mampu memanfaatkan fasilitas kredit usaha kecil yang tersedia, dan sekaligus mengidentifikasikan lembaga-lembaga keuangan pedesaan mana yang cocok dan berpotensi efektif menyalurkan KUK.

Metode Penelitian.

Dari hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan dapat dirangkai variabel yang menentukan kemampuan pengusaha kecil memanfaatkan fasilitas kredit sebagai berikut :

1. Prasyarat pinjaman yang diminta pihak bank.
2. Jaminan kredit (kolateral).
3. Jangkauan pelayanan pemberi kredit.
4. Bunga kredit.
5. Lamanya proses kredit
6. Perlakuan pelayanan.
7. Kemampuan memperkirakan resiko
8. Jangkauan informasi adanya fasilitas kredit
9. Peruntukan (sasaran) kredit
10. Pengetahuan tentang prosedur memohon kredit bank

Faktor-faktor tersebut akan merupakan variabel operasional dalam penelitian ini, yang dituangkan dalam bentuk kuisioner dan dilaksanakan dalam bentuk survei.

Data sekunder diperoleh dari dinas perindustrian, Bank Indonesia, Bank Umum, BPR, Koperasi, Pelepas Uang dan Pemasok dalam lokasi/berdekatan dengan lokasi penelitian. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan panduan kuisioner. Jumlah responden 100, yang terbagi atas 20 orang responden di setiap Kabupaten/Kotamadya.

Mengkode Data.

Untuk setiap pertanyaan yang diajukan kepada responden, disediakan lima jawaban alternatif. Dari setiap jawaban diberi kode yang sekaligus merupakan skor sebagai berikut :

- Sangat setuju..... kode 5
- Setuju..... kode 4
- Tidak peduli/Netral..... kode 3
- Tidak setuju..... kode 2
- Sangat tidak setuju..... kode 1

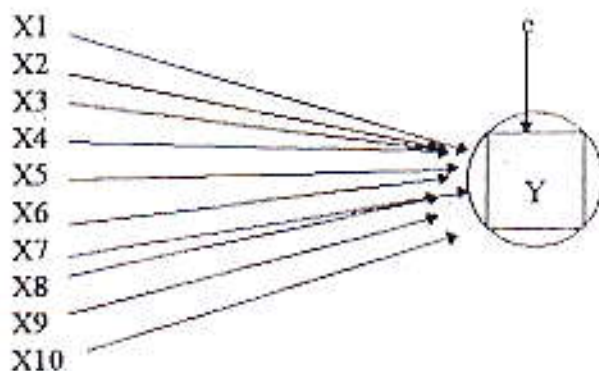
Kemudian dilakukan tabulasi dan disajikan dalam bentuk sebuah tabel matriks, dan dari tabel ini dilakukan analisis.

Analisis Data

Setelah dilakukan pengkodean dan tabulasi baru dilakukan analisis data. Penilaian dilakukan berdasarkan persentase dan skor yang diperoleh dari jawaban responden. Skor terutama dipakai untuk memperlihatkan nyata atau kurang nyatanya pengaruh variabel terhadap kapasitas pengusaha memanfaatkan fasilitas keredit bank ("Y"). Jumlah skor > 300 = pengaruhnya nyata, < 300 = pengaruhnya kurang nyata. Angka 300 merupakan jumlah skor tertinggi dari jawaban "Netral".

Penarikan Generalisasi Hasil Analisis Data

Dari hasil analisis data, akan dibuat generalisasi. Jika variabel-variabel independen dinyatakan dengan simbol "X" dan variabel dependen dengan simbol "Y", maka kerangka penarikan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut :



- X1 = prasyarat yang diminta perbankan
- X2 = Jaminan kredit (kolateral)
- X3 = Jangkauan Pelayanan Bank
- X4 = Bunga kredit
- X5 = Proses kredit
- X6 = Tingkah laku petugas bank dalam pelayanan
- X7 = Informasi
- X8 = kemampuan menanggung resiko
- X9 = peruntukan kredit
- X10 = pengetahuan responden tentang prosedur kredit
- Y = kemampuan mendapatkan kredit
- e = faktor-faktor lain yang tidak diketahui

Tabel 3.1

Matrik: Tanggapan responden terhadap variabel yang mempengaruhi kemampuan mendapatkan kredit.

No	VARIABEL-VARIABEL	SS	S	N	TS	ST	JUMLAH RESPONDEN
X1	Prasyarat kredit	9	32	13	42	4	100
X2	Kolateral	8	43	13	29	7	100
X3	Jangkauan pelayanan (letak kantor bank)	21	26	8	33	12	100
X4	Tingkat bunga kredit	17	38	6	35	4	100
X5	Proses persetujuan kredit terlalu lama	8	32	8	49	3	100
X6	Perlakuan (sikap) petugas bank dalam pelayanan	15	50	27	6	2	100
X7	Kemampuan memperkirakan resiko	11	30	7	43	9	100
X8	Jangkauan informasi KUK	6	11	21	62	0	100
X9	Peruntukan kredit	47	41	3	9	0	100
X10	Pengetahuan responden tentang prosedur kredit	2	12	15	59	12	100

Sumber : Diolah sendiri hasil jawaban kuisioner (des 1999 - Feb 2000)

SS = Sangat setuju, S = Setuju, N = Netral, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat tidak setuju

Tabel 3.2

Matriks Tanggapan responden yang dikonversi ke dalam skor

No	VARIABEL - VARIABEL	SS	S	N	TS	ST	JUMLAH
	SKOR	5	4	3	2	1	SKOR
X1	Prasyarat kredit	45	128	39	84	4	300
X2	Kolateral	40	172	39	58	7	316
X3	Jangkauan pelayan (letak kantor bank)	105	104	24	66	12	311
X4	Tingkat bunga kredit	85	152	18	70	4	329
X5	Proses persetujuan kredit terlalu lama	40	128	24	98	3	293
X6	perlakuan (sikap) petugas bank dalam pelayanan	75	200	81	12	2	370
X7	Kemampuan memperkirakan resiko	55	120	21	86	9	291
X8	Jangkauan informasi KUK	30	44	63	124	0	261
X9	Peruntukan kredit	235	164	9	18	0	436
X10	Pengetahuan responden tentang prosedur kredit	10	48	45	118	12	233

Sumber : Tabel 3.1

Tabel 3.3

Jumlah Bank dan Kantor Kas Bank di Sumatera Barat, tahun 1999

	Bank	Kantor
Bank Umum	18	222
BPR	103	106
BKD, Kredit Pedesaan	-	521

Sumber : Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (BI)

Tabel 3.5. Sumber modal pengusaha kecil

No	SUMBER	JUMLAH RESPONDEN	DALAM PERSEN
1	Modal sendiri	89	89
2	Bank Umum	2	2
3	BRI Unit	30	30
4	BPR	26	26
5	Koperasi	18	18
6	Pemasok	15	15
7	Pelepas Uang	9	9
8	Keluarga/teman	21	21

Sumber : Diolah dari jawaban kuisioner 100 orang responden pada bulan Des 99 - Jan 2000.

. Kesimpulan

1. Kapasitas industri kecil memanfaatkan fasilitas kredit perbankan dipengaruhi oleh prasyarat kredit, kolateral, jangkauan pelayanan, lamanya proses kredit, sikap pelayanan petugas bank, kemampuan pengusaha itu memperkirakan resiko, jangkauan informasi, peruntukan kredit dan pengetahuan pengusaha tentang prosedur permohonan kredit itu. Namun intensitas pengaruh dari masing-masing variabel berbeda-beda, antara lain tergantung pula pada jenis bank yang mereka hubungi (Bank Desa atau Bank Umum). Variabel yang berpengaruh nyata adalah prasyarat kredit, kolateral, jangkauan pelayanan, tingkat bunga, pelayanan petugas bank, kemampuan memperkirakan resiko, peruntukan kredit. Kelima faktor ini berpengaruh nyata pula terhadap sikap industri kecil tetap berhubungan dengan sumber-sumber dana tradisional. Yang kurang nyata pengaruhnya adalah variabel pengetahuan prosedur menghubungi bank, jangkauan informasi.
2. BRI Unit Desa dan BPR merupakan bank yang paling banyak dihubungi pengusaha industri kecil di desa, dan pengusaha industri kecil di sekitar kota.

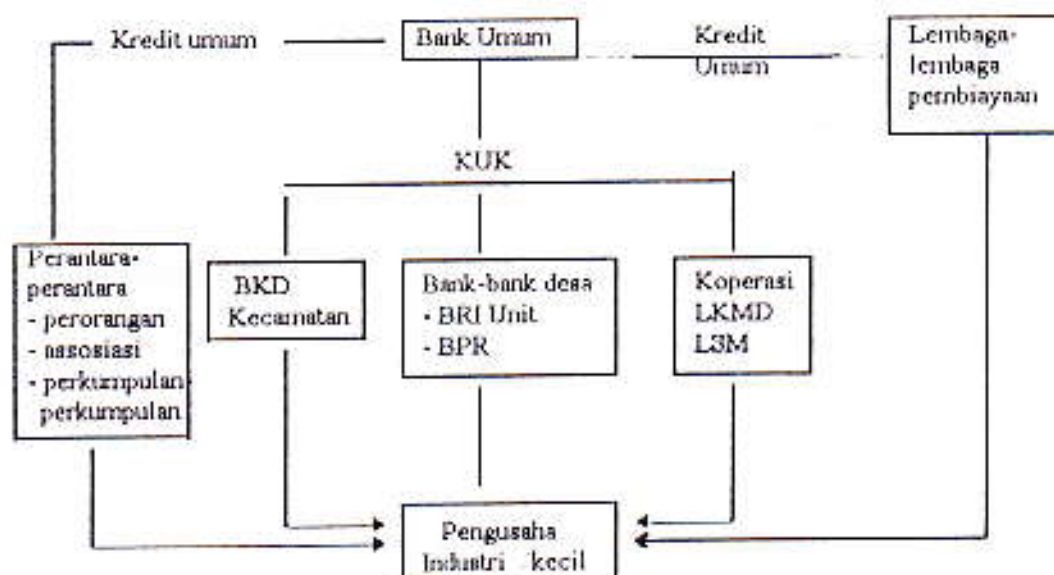
Kedua bank ini menyalurkan kredit umum yang dirancang khusus untuk desa (Kupdes BRI) dan dengan bunga yang berlaku dipasaran.

3. Koperasi Unit Desa juga merupakan sumber dana nomor dua penting bagi industri kecil di desa.
4. Dari kajian pustaka ditemukan bahwa lembaga/organisasi/perantara bisa dikembangkan sebagai perpanjangan tangan Bank Umum menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil.

Implikasi Penelitian

Dari penelitian ini sudah diketahui faktor yang berpengaruh negatif dan yang berpengaruh positif terhadap kapasitas pengusaha industri kecil memanfaatkan kredit dari Bank umum.

Setelah mempelajari berbagai alternatif baik pengkajian pustaka, maupun hasil penelitian lapangan dapat diusulkan suatu mekanisme penyaluran KUK yang sesuai dengan kondisi pengusaha industri kecil, sebagaimana terlihat dalam gambar ini ;



Setiap daerah mempunyai kondisi dan situasi yang berbeda. Bahwa keberhasilan suatu uji coba dalam suatu daerah belum tentu bisa berhasil ditetrapkan di daerah lain. Ditinjau dari segi hambatan birokrasinya, dan kecepatan pengambilan keputusan, maka lembaga yang cocok untuk melayani industri kecil ialah lembaga keuangan yang kecil-kecil. Namun dari segi ketahanan keuangannya, lembaga ini mempunyai resiko tinggi, dan resiko itu terpaksa ditanggungnya sendiri oleh bank yang kecil itu. Karena itu bank kecil rentan akan kebangkrutan yang pada gilirannya akan merugikan nasabah penabung. Karena itulah masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang manajemen lembaga keuangan desa dalam rangka mencapai ketahanan keuangan yang tangguh.

Beberapa Saran.

Dengan kenyataan tersebut, Bank dapat belajar banyak dari cara operasi pemberi kredit informal (rentenir) tersebut. Tukang-tukang kredit (rentenir) itu lebih dekat dengan pelanggannya, dan dapat membebaskan tingkat bunga yang sebenarnya hanya sedikit lebih tinggi dari biaya transaksi yang lebih efektif diselenggarakan oleh lembaga keuangan formal. Bank seharusnya menekankan lebih banyak pada kemampuan pembayaran kembali kredit itu, bukan penekanan pada penerapan tingkat bunga yang rendah dan adanya kolateral.

Persatuan-persatuan pengusaha kecil dapat pula bertindak sebagai penyalur dana, terutama di daerah dimana sejumlah perusahaan kecil yang mengumpul dalam suatu lokasi. Perasaan kebersamaan yang kuat merupakan kekuatan yang mempersatukan mereka, sehingga keberhasilan organisasi adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu organisasi seperti itu telah terbukti mampu dan berhasil

sebagai pemberi kredit informal, dan dapat memberikan pinjaman maksimum \$20 pada rekan sesama pengusaha dengan bunga 4% per bulan (tingkat bunga ini masih jauh lebih rendah dari tingkat bunga pinjaman dari rentenir). Dengan cara ini lebih banyak pengusaha lapisan bawah yang tertolong.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas, maka bank seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat dalam rangka mencari saluran distribusi kredit yang cocok yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pengusaha kecil dan sebaliknya juga harus dapat memuaskan kepentingan bank itu sendiri. Tidak ada solusi yang standar tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan setempat. Dari hasil penelitian penelitian diatas ada beberapa saluran alternatif yang dapat ditempuh bank, antara lain penyaluran kredit melalui :

- Bank mikro lokal
- Perantara perorangan
- Kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisasi
- Agen-agen yang menerima komisi.
- Kantor-kantor lapangan yang mendapat pengawasan ketat, sebagaimana telah diterapkan oleh sebagian BRI Unit Desa, dengan PPD-nya, dan BPD dengan bank kelilingnya.

Daftar Bacaan

- Abdul Salam (1995), *Kredit Usaha Kecil (KUK) dan upaya pengoptimalkannya*.
Majalah pengembangan Perbankan Nov/Des 1995.
- Irvandi Gustari (1997), *Denda KUK yang menjadi problema bank*, *Harian bisnis Indonesia*, 25 Maret.
- Malcolm Harper, *Small Business in the Third World*, John Willeysons 1985.
- Subianto Tjakrawerdjaya (1994), *Modal Ventura : Alternatif pembiayaan perusahaan*, *Majalah Usahawan*, September.
- Satrio Purnomo (1994), *Masalah-masalah yang dihadapi dalam penyaluran Kredit Usaha Kecil*, dalam majalah pengembangan Perbankan, Juli - Agustus 1994.
- Sugianto, *Perkembangan kebijaksanaan keuangan pertanian pedesaan serta kemajuan dan manfaat KUPeDES BRI*, dalam majalah Pengembangan Perbankan, Juli - Agustus 1990.